



Jenis Artikel: Penelitian Empiris

Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kharisma Ardy Bestari dan Fitri Wahyuni*



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

fitri.wahyuni@umy.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v7i1.16995

SITASI:

Bestari, K. A. & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163-184.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

30 Nov 2022

Reviu:

01 Jan 2023

Revisi:

02 Mar 2023

Diterbitkan:

03 Mar 2023



Abstrak

Latar Belakang: Fakta pelaporan LKPD di Indonesia menarik untuk dikaji. Jika melihat laporan keuangan pemerintah daerah lebih dalam lagi, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian data yang disajikan, dan banyak penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK pada laporan keuangan terutama dalam pengelolaan anggaran. Setiap penggunaan anggaran dan keuangan harus dipertanggung jawabkan dalam pengelolaannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, maka diwajibkan membuat laporan keuangan yang akuntabel, yang mana sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Tegal.

Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan di OPD Kota Tegal. Populasi penelitian sebanyak 24 OPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel pada populasi secara tidak acak serta memperhatikan strata yang ada dalam populasi agar sampel lebih representatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada metode pengambilan sampel yaitu menggunakan kuesioner, serta hanya menggunakan sampel yang berasal dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Tegal.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penambahan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang belum konsisten ada penelitian yang menunjukkan hasil positif berpengaruh dan juga masih ada penelitian yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; Sistem Pengendalian Internal

Pendahuluan

Sejak diberlakukan otonomi daerah, pemerintah pusat telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan keuangan daerahnya secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui desentralisasi harapannya setiap daerah akan semakin baik dan bertanggung jawab dalam mengelola pembangunan daerahnya karena telah diberikan kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan diberlakukan desentralisasi setiap daerah maka diharapkan akan semakin efektif dan efisien dalam pengelolaan pembangunan karena telah diberikan kebebasan yang luas oleh pemerintah pusat dalam mengatur kebijakan demi kemajuan daerahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah akan memberi dampak lebih baik terhadap layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (publik). Pemerintah diharuskan melaksanakan akuntabilitas publik sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat fakta tentang laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tidak sesuai peraturan dan masih ditemukan kekeliruan yang ditemukan sehingga mengakibatkan tuntutan publik pada penyelenggaraan pemerintah yang baik akan meningkat. Hal tersebut akan membuat pemerintah semakin terdorong dan termotivasi dalam melaksanakan akuntabilitas publik. Banyak pihak yang membutuhkan dan mengandalkan informasi laporan keuangan yang dilaporkan atau dipublikasikan oleh pemerintah daerah untuk dasar pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik akan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah yang disajikan wajib sesuai dengan pedoman standar akuntansi pemerintahan.

Bentuk tata Kelola pemerintahan yang baik salah satunya dengan tingkat kualitas LKPD yang baik dan dapat dipahami penggunaannya. Oleh karena itu, kualitas dalam LKPD sangat penting karena dapat memberikan dampak yang positif, bermanfaat dalam upaya pengambilan keputusan dan juga menentukan kebijakan di dalam pemerintahan di waktu mendatang. Hal ini juga dapat memberikan dampak kepada peningkatan percepatan pembangunan serta penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi seperti kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat yang belum berkompeten. Berkualitasnya suatu LKPD dapat dilihat melalui perolehan opini audit BPK yang diterima pada pemerintah daerah tersebut. Opini audit merupakan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BPK berdasarkan kewajaran informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini audit dibagi ke dalam lima tingkatan (Mahmudi, 2016). Berikut tingkatan dari tertinggi ke terendah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP

DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Tegal menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2016 dan 2017 masih mendapatkan opini WDP, Sedangkan tahun 2018 hingga 2020 Pemerintah Kota Tegal memperoleh Opini WTP. Perolehan opini atas LKPD Kota Tegal disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perolehan Opini atas LKPD Kota Tegal Tahun 2016-2020

Entitas	Opini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tegal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal pada tahun 2016 dan 2017 masih mendapatkan opini WDP, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas LKPD Kota Tegal masih lemah yang menyebabkan laporan keuangan yang disajikan belum berkualitas. Pada tahun 2018 sampai 2020 Kota Tegal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK-RI, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah Kota Tegal.

Meskipun telah mendapatkan opini WTP, dalam hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Tegal TA. 2018-2020, BPK masih menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dalam hasil pemeriksaan LKPD kota Tegal. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal yang ditemukan BPK diantaranya; 1) Kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan pada empat OPD sebesar Rp214.899.052,69; 2) Penatausahaan pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak tertib dan kelebihan bayar sebesar Rp787.531.300,00; 3) Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Tegal yang belum optimal, dan 4) Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah terlambat diterima PPKD sebesar Rp4.343.095.000,00; 5) Ketidaktepatan penganggaran belanja di 13 OPD sebesar Rp20.661.553.875 mengakibatkan lebih dan kurang saji belanja barang; 6) Pencatatan dan pengelolaan aset tetap belum memadai mengakibatkan meningkatnya risiko penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak, risiko kehilangan aset, dan sengketa tanah; 7) Terdapat tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas sebesar Rp42.251.699,94; 8) Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan pada DPUPR, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Diskop UKMP sebesar Rp315.851.761,52.

Pada penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD yang akan dibahas, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pemilihan lima faktor yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan banyaknya perbedaan hasil yang belum terlihat kejelasan arah pengaruh (positif atau negatif) dari masing-masing faktor. Faktor pertama adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). SDM adalah unsur yang cukup penting pada sebuah organisasi, oleh karena itu supaya

dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi maka dibutuhkan pengelolaan SDM yang baik. SDM merupakan pilar utama dalam sebuah organisasi atau instansi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, oleh karena itu sebaik apapun sistem dalam organisasi tersebut akan sia-sia jika tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten terutama pada personal sumber daya manusia dalam Pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Kompetensi SDM pada penelitian Modo dkk (2016) dan Armel dkk (2017). memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian lainnya yaitu Wijayanti (2017) dan Zulkarnain dan Ningrum (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas LKPD yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Di era ini teknologi informasi sangat dibutuhkan di berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi, berkembangnya teknologi informasi dapat memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Dengan didukungnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, dengan ketersediaan teknologi informasi yang semakin maju diharapkan dapat membantu proses pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas serta tepat waktu. Pemanfaatan TI pada penelitian Yuliani dan Agustini (2016) dan Ardianto dan Eforis (2019) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan Modo dkk (2016) menyatakan sebaliknya. Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Menurut Nordiawan (2009) SAKD adalah serangkaian proses mulai pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan baik secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada penelitian Pujanira dan Taman (2017) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian Sholohah dkk (2019) menyatakan sebaliknya yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jika suatu LKPD telah memenuhi karakteristik kualitatif tersebut pada informasi yang terkandung maka, pemerintah daerah dianggap mampu memberikan peningkatan atas kualitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan sesuatu yang krusial, karena banyaknya informasi yang terkandung didalamnya serta digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak pemerintah. Indonesia masih banyak memiliki masalah yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang masih buruk atau belum berkualitas. Penerapan SAP pada penelitian Mahardini dan Miranti (2018) dan Rahmawati dkk (2018) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Faktor kelima yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat untuk mengontrol jalannya semua kegiatan untuk pemimpin ataupun para pegawai guna tercapainya tujuan organisasi. SPI merupakan proses pengendalian terhadap perilaku maupun aktivitas yang dikerjakan oleh pimpinan dan

pegawai suatu instansi yang dilaksanakan secara berulang bukan dalam waktu tertentu. SPI pada penelitian Armel dkk (2017) dan Rahmawati dkk (2018) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, sedangkan menurut penelitian Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan sebaliknya.

Penelitian ini adalah hasil modifikasi penelitian Hasdiana dan Hasang (2018). Pada penelitian ini menggunakan sampel semua pengelola keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota Tegal, karena pada penelitian sebelumnya hanya mengambil sampel dari Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat dan DPRD Kota Parepare saja. Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan seseorang atau individu dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. SDM adalah komponen utama sekaligus penggerak dalam organisasi guna melangsungkan visi misi serta tujuan organisasi. Pada penelitian terdahulu mengenai kompetensi SDM masih menunjukkan hasil yang belum konsisten masih ada penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan yang dilakukan secara manual atau dengan bantuan aplikasi untuk pertanggungjawaban pemerintah. Penambahan variabel juga didasari oleh penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang belum konsisten ada penelitian yang menunjukkan hasil positif dan juga masih ada penelitian yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Stewardship Theory

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang mendeskripsikan suatu kondisi manajer atau pemimpin tidak berfokus pada tujuan pribadi, melainkan lebih berorientasi pada tujuan utamanya yaitu kepentingan suatu instansi atau lembaga. Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan kuat antara keberhasilan instansi atau lembaga dengan kepuasan pemilik. Upaya untuk sukses pada suatu instansi atau lembaga yaitu dengan memaksimalkan utilitas kelompok *participal* dan manajemen sehingga kepentingan bersama dapat dimaksimalkan. Teori ini menganggap bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kesuksesan instansi/lembaga dengan kepuasan pemilik. Upaya untuk memperoleh kesuksesan pada sebuah instansi atau lembaga adalah dengan memaksimalkan utilitas kelompok *participal* dan manajemen, sehingga kepentingan individu dalam organisasi tersebut dapat dimaksimalkan. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan sebuah organisasi dengan kepuasan *principal*. Teori ini mendasari konsep yang digunakan Organisasi sektor publik, aparat pemerintah bertindak sebagai

steward yang akan melayani masyarakat sebagai pemilik (principal), karena dalam sistem pemerintahan di Indonesia warga atau masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat, oleh karena itu laporan keuangan harus disusun dengan kualitas yang baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting yang berpengaruh pada kinerja karyawan atau pegawai di suatu lembaga. Pegawai di suatu lembaga harus mempunyai kompetensi yang memadai, keahlian khusus, serta perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan spesifikasi yang dimilikinya tersebut maka akan meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga lebih efektif dan efisien.

Dalam pembuatan LKPD, diperlukan SDM yang memiliki sebuah kompetensi dalam bidang akuntansi. Dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi serta latar belakang Pendidikan akuntansi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta tujuan organisasi dapat tercapai. Pada yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017b) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Armel dkk (2017) dan Mahardini dan Miranti (2018) juga menunjukkan hasil adanya pengaruh yang positif signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada teori *stewardship* dapat diasumsikan bahwa eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh publik mampu menjalankan tugas serta fungsinya dengan tepat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya maka membutuhkan SDM yang berkompeten dalam membuat informasi yang berkualitas pada laporan keuangan. SDM yang berkompeten yang didukung dengan latar Pendidikan yang memadai, serta berpengalaman di bidang keuangan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang berkompetensi baik yaitu yang memiliki sikap, pengetahuan, dan skill, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bebas dari kesalahan.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi yang di dalamnya meliputi pengolahan data, informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara elektronik dan juga pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan publik. Penggunaan komputer, *software* ataupun perangkat lunak lainnya yang sejenis secara optimal merupakan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini peran komputer sangat penting dalam membantu

peningkatan kualitas informasi karena komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan dibandingkan dengan cara manual. Adapun dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, maka pemerintah dapat membangun suatu sistem informasi yang mencakup manajemen, proses kerja dimana hal ini akan memungkinkan pemerintah dapat melakukan pekerjaannya secara terpadu dan efisien karena kemudahan akses unit kerja oleh teknologi informasi ini. Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa manajer tidak memiliki kepentingan pribadi tetapi mementingkan kepentingan organisasi, maka dengan pemanfaatan teknologi informasi akan membantu memudahkan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Armel dkk (2017) mendapatkan hasil pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ardianto dan Eforis (2019) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan menerapkan teori *stewardship*. Teori ini menggambarkan bahwa kepuasan serta kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang kuat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan sangat berguna untuk penyampaian informasi dengan cepat sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien, serta tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal yaitu dengan memanfaatkan perangkat komputer dan jaringan internet yang baik dapat mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bagi penggunanya. Begitu pula sebaliknya jika tidak digunakan dengan maksimal maka kualitas yang dihasilkan pun rendah.

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan rangkaian prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan yang dilakukan secara manual atau otomatis menggunakan aplikasi komputer dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam penyajian laporan keuangan maka dibutuhkan sistem yang baik dan dapat membantu dalam penyusunannya. Sistem yang dibutuhkan tersebut adalah sistem akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang diharapkan yaitu berkualitas baik. Berdasarkan harapan tersebut maka dalam penyusunannya dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah. Dilihat dari tujuan SAKD yaitu menyediakan informasi secara lengkap, dan terperinci sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, andal dan dapat digunakan oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. Pelaksanaan SAKD

didasarkan pada kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Pujanira dan Taman (2017) SAKD berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Zulkarnain dan Ningrum (2020) menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Pada teori *stewardship* dijelaskan bahwa pemerintah disini bertindak sebagai *steward* yang berkewajiban melaporkan informasi keuangan atau laporan keuangan kepada masyarakat. Maka dalam proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan serangkaian prosedur yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dimulai dari proses mengumpulkan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan. Dari penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa penerapan SAKD apabila diterapkan oleh suatu lembaga pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

H₃: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan sifat yang harus ada dalam sebuah laporan keuangan. Salah satu peran pemerintah dalam mengelola keuangan negara dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Persyaratan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas APBD, baik dalam penyusunan ataupun penyajian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu standar akuntansi pemerintahan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan teori *stewardship* yang mengasumsikan bahwa pelayan masyarakat dalam hal ini adalah pemerintah maka harus bertindak penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka pemerintah harus memahami SAP yang dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas LKPD. Penelitian Armel dkk (2017) menyatakan penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Daerah. Mahardini dan Miranti (2018) menjelaskan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Ardianto dan Eforis (2019) juga menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Untuk meningkatkan kualitas LKPD maka diperlukan pedoman dalam penyusunan LKPD yaitu standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas maka semakin tinggi pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan maka semakin tinggi juga tingkat kualitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

H₄: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Internal

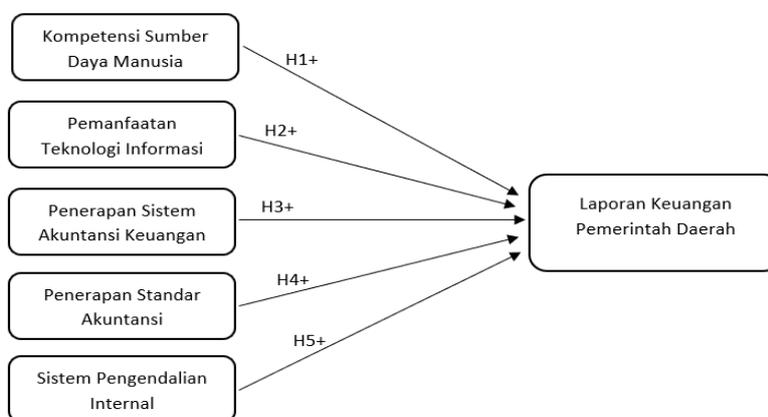
Lembaga pemerintahan merupakan suatu instansi yang berisikan orang-orang yang dipilih sebagai pemegang amanah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu amanah yang diberikan adalah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Penyajian laporan keuangan tidak hanya membutuhkan kompetensi saja melainkan juga membutuhkan sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mencapai visi misi serta tujuan organisasi dengan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan pada lembaga/instansi.

Pada Penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Armel dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Rahmawati dkk (2018) mendapatkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan asumsi teori *stewardship*, pemerintah memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan pada masyarakat. Hal ini karena laporan keuangan menjadi acuan bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu laporan keuangan harus disusun dengan kualitas yang baik dan memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pada hal ini dengan adanya sistem pengendalian internal maka dapat meminimalisir tingkat kesalahan atau kecurangan dalam penyusunan LKPD. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

H₅: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan perumusan hipotesis dapat diperoleh metode penelitian pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal. Sedangkan Subjek dari penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di OPD yang memiliki hubungan secara langsung pada bidang pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tanpa perantara melalui hasil kuesioner yang didistribusikan kepada kepala dan staf bagian keuangan pada masing-masing OPD Kota Tegal.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam metode pengambilan sampel dengan pertimbangan memilih sampel supaya dapat memberikan data yang akurat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala dan staff bagian keuangan yang sudah bekerja selama 1 tahun atau lebih pada OPD di Kota Tegal. Kriteria tersebut berdasarkan pertimbangan sampel yang memahami penyusunan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan pernyataan-pernyataan tertulis dan terstruktur. Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan Teknik analisis linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS.

Menurut Ghozali (2011) berguna untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel bebas (variable independent) terhadap variabel terikat (variabel dependen).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal yang meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, yaitu menyebarkan dan menyerahkan kuesioner secara langsung kepada responden pada masing-masing OPD di Kota Tegal, kemudian mengambil kuesioner kembali sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh masing-masing OPD. Kuesioner yang disebar pada penelitian ini sebanyak 120 kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara pada setiap OPD Kota Tegal.

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	Item	Indikator	Sig	r hitung
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LKPD 1	Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,000	0,569
	LKPD 2	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (<i>feedback value</i>) dan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive value</i>)	0,000	0,665

Tabel 2 Uji Validitas (lanjutan)

Variabel	Item	Indikator	Sig	r hitung
	LKPD 4	Informasi dalam laporan keuangan saya buat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.	0,000	0,574
	LKPD 5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	0,000	0,751
	LKPD 6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	0,000	0,677
	LKPD 7	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah	0,000	0,697
	LKPD 8	Informasi yang dihasilkan dalam laporan OPD yang saya susun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.	0,000	0,645
	LKPD 9	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	0,000	0,713
	LKPD 10	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya tidak menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.	0,000	0,724
	LKPD 11	Saya tidak menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.	0,000	0,439
	LKPD 12	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna	0,000	0,326
	LKPD 13	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	0,000	0,471
	LKPD 14	Laporan Keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti	0,000	0,423
Kompetensi Sumber Daya Manusia	SDM 1	Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai PPK atau Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dengan baik.	0,000	0,568
	SDM 2	Saya memahami siklus akuntansi dengan baik dan memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang dilakukan dengan baik.	0,000	0,592
	SDM 3	Saya memahami Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik	0,000	0,597

Tabel 2 Uji Validitas (lanjutan)

Variabel	Item	Indikator	Sig	r hitung	
SDM	4	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng- <i>Upgrdade</i> pengetahuan saya dibidang akuntansi.	0,000	0,567	
	5	Saya mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan benar dan memposting jurnal ke dalam buku besar.	0,000	0,550	
	6	Saya tidak mampu menyusun dan menyajikan Neraca dan laporan realisasi anggaran dengan baik.	0,000	0,625	
	7	Saya mampu menyusun dan menyajikan Catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas dengan baik	0,000	0,556	
	8	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan	0,000	0,417	
	9	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan	0,000	0,511	
	10	Saya selalu memberikan keteladanan kepada bawahan dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai PPK atau Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dengan baik.	0,000	0,452	
	11	Saya selalu menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai PPK atau Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dengan baik.	0,000	0,558	
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	TI 1	Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas	0,000	0,807
		TI 2	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi	0,000	0,860
		TI 3	Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,000	0,859
TI 4		Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur .	0,000	0,843	
TI 5		Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi tidak memanfaatkan jaringan internet di unit sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan .	0,000	0,759	
TI 6		Jaringan internet di OPD tempat saya bekerja selalu dalam kondisi yang baik/lancar untuk digunakan	0,000	0,817	

Tabel 2 Uji Validitas (lanjutan)

Variabel	Item	Indikator	Sig	r hitung
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	SAKD 1	Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik.	0,000	0,489
	SAKD 2	Pencatatan keuangan yang digunakan selama ini sudah efektif	0,000	0,731
	SAKD 3	Pencatatan keuangan yang dilakukan tidak relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada.	0,000	0,717
	SAKD 4	Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur .	0,000	0,690
	SAKD 5	Pencatatan keuangan yang dilakukan menimbulkan dampak positif bagi instansi.	0,000	0,728
	SAKD 6	Saya melakukan penggolongan /pengikhtisaran transaksi ekonomi.	0,000	0,674
	SAKD 7	Saya menjurnal dan memposting sesuai dengan nomor yang sudah ditetapkan pemerintah.	0,000	0,821
	SAKD 8	Kesalahan atau penyimpangan jarang terjadi dalam penggolongan kegiatan/transaksi ekonomi	0,000	0,786
	SAKD 9	Pelaporan yang dilakukan sudah sesuai antara keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan.	0,000	0,365
	SAKD 10	Pelaporan atau buku laporan yang dibuat tidak sesuai prosedur yang berlaku.	0,000	0,346
	SAKD 11	Pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah relevan dengan fakta keuangan yang ada.	0,000	0,463
	SAKD 12	Kesalahan atau penyimpangan jarang terjadi dalam pelaporan keuangan.	0,000	0,379
Standar Akuntansi Pemerintahan	SAP 1	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset dalam neraca, mengakui kewajiban dan ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	0,000	0,759
	SAP 2	Saya menerapkan basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.	0,000	0,784
	SAP 3	Saya tidak menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	0,000	0,753
	SAP 4	Catatan atas laporan keuangan OPD yang saya susun selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos- pos dalam laporan keuangan.	0,000	0,756
	SAP 5	Saya selalu mengakui persediaan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, dan selalu saya laksanakan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.	0,000	0,756
	SAP 6	Saya selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi	0,000	0,662

Tabel 2 Uji Validitas (lanjutan)

Variabel	Item	Indikator	Sig	r hitung
		potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.		
	SAP 7	Saya selalu mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya Perolehannya, dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.	0,000	0,659
	SAP 8	Saya selalu memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.	0,000	0,653
	SAP 9	Saya selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal, dan mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.	0,000	0,756
	SAP 10	Saya selalu mengoreksi kesalahan yang tidak berulang melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.	0,000	0,451
	SAP 11	Saya selalu menyajikan laporan keuangan konsolidasian untuk periode pelaporan yang sama dengan pelaporan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.	0,000	0,471
	SAP 12	Saya menerapkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.	0,000	0,461
Sistem Pengendalian Internal	SPI 1	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai	0,000	0,566
	SPI 2	Pimpinan OPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	0,000	0,527
	SPI 3	Pimpinan OPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku	0,000	0,798
	SPI 4	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi	0,000	0,715
	SPI 5	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi	0,000	0,811
	SPI 6	Pegawai dan atasan tidak memahami tujuan dari kegiatan pengendalian	0,000	0,824
	SPI 7	Semua transaksi yang dientri dan diproses kedalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi	0,000	0,678
	SPI 8	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik	0,000	0,853

Tabel 2 Uji Validitas (lanjutan)

Variabel	Item	Indikator	Sig	r hitung
	SPI 9	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.	0,000	0,673
	SPI 10	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan	0,000	0,635
	SPI 11	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, OPD tidak melakukan perbaikan pengendalian intern	0,000	0,659
	SPI 12	OPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/ revidi dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat	0,000	0,750
	SPI 13	Pimpinan selalu merevidi dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan	0,000	0,726

Tabel 2 menunjukkan bahwa instrumen masing-masing variabel memiliki nilai r hitung > r tabel yaitu 0,187 dan memiliki nilai sig < 0,05 yang artinya instrumen penelitian yang digunakan dapat dikatakan layak atau valid.

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,841
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,756
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,895
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,818
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,876
Sistem Pengendalian Internal	0,919

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa instrumen penelitian yang digunakan tersebut reliabel.

Tabel 4 Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov	Nilai Sig
Asymp.Sig (2-tailed)	0,200

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,788	1,269
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,855	1,170
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,849	1,177
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,915	1,092
Sistem Pengendalian Internal	0,829	1,206

Berdasarkan Tabel 4 mengenai hasil uji normalitas pada persamaan regresi diketahui bahwa nilai asymp sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Berdasarkan Tabel 5 mengenai uji multikolinearitas tersebut, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,373
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,524
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,943
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,670
Sistem Pengendalian Internal	0,098

Berdasarkan pada Tabel 6 mengenai hasil uji heteroskedastisitas diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas pada analisis regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7 Uji Hipotesis dan Analisis Data

Variabel	B	Sig. t
(constant)	-9,834	0,087
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,203	0,019
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,235	0,030
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,936	0,000
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	-0,159	0,018
Sistem Pengendalian Internal	0,266	0,000
F	54,232	
Sig. F	0,000	
Adjusted R Square	0,708	

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,708 (Tabel 7). Artinya 70,8% Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal. Selanjutnya, nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi diatas variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) menunjukkan nilai sig $0,019 < 0,05$ dan nilai koefisien $0,203$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (X1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Pujanira dan Taman (2017), serta Armel, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia merupakan elemen yang menentukan berkualitasnya suatu LKPD. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik dalam hal ini berkompeten dalam bidang akuntansi, memiliki pengetahuan teknis tentang akuntansi maka dapat meningkatkan kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa pemerintah sebagai steward bertugas menyajikan informasi keuangan kepada publik secara tepat. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka SDM yang berkompeten sangat diperlukan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa ketika pegawai OPD memiliki kompetensi yang tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas baik.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi diatas variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) menunjukkan nilai sig $0,030 < 0,05$ dan nilai koefisien $0,235$. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H2) dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016), dan Penelitian Ardianto dan Eforis (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. pemanfaatan TI berkaitan dengan kualitas LKPD yaitu berperan dalam mempercepat prosedur penyajian laporan dan olah data transaksi pemerintah daerah.

Dalam meningkatkan kualitas yang lebih baik pada laporan keuangan membutuhkan teknologi sehingga dalam proses penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang optimal melalui proses pengolahan data transaksi hingga penyajian laporan keuangan yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. Hal tersebut sesuai dengan teori stewardship bahwa pemerintah adalah sebagai steward yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik yang transparan dan optimal dalam hal ini berupa pengolahan data transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan komputer dengan menggunakan aplikasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku serta telah menggunakan internet sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang optimal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi di atas variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X3) menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien $0,936$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil pengujian koefisien regresi menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017), dan Zulkarnain dan Ningrum (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk memperoleh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Dalam penyajian laporan keuangan membutuhkan suatu sistem yang dapat membantu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan yang diharapkan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori stewardship dimana peran pemerintah sebagai steward yang bertanggung jawab menyajikan informasi kepada publik berupa pelaporan keuangan yang berkualitas. Maka, semakin digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin berkualitas.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi di atas variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X4) menunjukkan nilai sig $0,018 < 0,05$ dan nilai koefisien $-0,159$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (X4) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetapi koefisien regresi tidak searah dengan arah

hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil pengujian koefisien regresi menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang digunakan baik dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan pemerintahan (pusat dan daerah). Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman yang digunakan setiap instansi pemerintah dan berkedaulatan hukum dan dibuat sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan standar akuntansi pemerintahan pada OPD Kota Tegal belum maksimal, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pemeriksaan BPK-RI atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual pada akun pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas pada tahun 2020, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang ditemukan dalam LKPD Tahun 2020. Kasus tersebut pada umumnya terjadi karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, dan sistem atau aplikasi yang belum mendukung (BPK,2020).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (H5)

Berdasarkan hasil uji regresi di atas variabel sistem pengendalian internal (X5) menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien 0,266. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X5) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) diterima. Hasil pengujian koefisien regresi menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Armel, dkk (2017), dan Rahmawati, dkk (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian internal merupakan sebuah fondasi serta pertahanan dalam melawan ketidakstabilan dan kecurangan data informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal memiliki tugas sebagai pengarah, pengawasan, serta berfungsi sebagai pendeteksi dan pencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai monitor seluruh kegiatan keuangan pada instansi sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan teori stewardship dimana pemerintah memiliki kewajiban dalam

melaporkan laporan keuangan kepada masyarakat, maka dengan adanya sistem pengendalian ini akan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan SPI yang lebih baik akan mempengaruhi kualitas LKPD yang dihasilkan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada metode penumpukan data yaitu menggunakan kuesioner, sehingga terdapat beberapa kelemahan yaitu terkadang dapat menimbulkan bias dalam pengisian kuesioner karena peneliti tidak memantau secara langsung sehingga jawaban mungkin saja tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Pengambilan sampel ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya. Peneliti hanya menggunakan lima variabel sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi Informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan serta sistem atau aplikasi yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Faktor-faktor tersebut yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini dilakukan pada OPD Kota Tegal, dengan alat analisis yang digunakan yaitu aplikasi SPSS.

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin tinggi atau baik kompetensi sumber daya manusia yang ada yaitu berkompeten dalam bidang akuntansi maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hal ini didukung pula dengan tersedianya sarana prasarana berupa komputer yang memadai serta jaringan internet guna membantu dan mempercepat proses dalam pelaporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Dalam hal ini OPD Kota Tegal telah menggunakan standar akuntansi pemerintah daerah yaitu meliputi pencatatan, penggolongan atau pengikhtisaran, dan pelaporan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat disebabkan karena kurang optimalnya pemanfaatan standar akuntansi pemerintahan pada penyusunan laporan keuangan pada OPD sehingga menyebabkan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak meningkatkan kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa instansi yang memiliki pengendalian internal yang baik dalam hal ini yaitu pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Saran untuk penelitian selanjutnya yang pertama adalah disarankan untuk melengkapi metode survei dengan sesi wawancara atau mengajukan pertanyaan secara lisan guna meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan. Kedua, menambah atau menggunakan variabel lain yang mungkin dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD. Saran untuk OPD Kota Tegal adalah sebaiknya OPD Kota Tegal lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi pemerintahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga standar akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Armel, R., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 105–119.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian Journal of Management*, 16(June 1991). <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Hasdiana, H., & Hasang, I. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 1. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i3.562>
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 1290–1318.

- Laila, Y. N., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Volume 14,(1), 56–64.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 14–30. <https://doi.org/10.35800/jrs.v7i2.13550>
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. (2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No.13 Tahun 2006*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. (2007). *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *PP No. 71 Tahun 2010*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45. <https://doi.org/10.32400/iaj.26622>
- Undang-Undang Nomor 17. (2003). Keuangan Negara. *UU No. 17 Tahun 2003*.
- Undang-Undang Nomor 32. (2004). Pemerintahan Daerah. *UU No. 32 Tahun 2004*. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Undang-Undang Nomor 33. (2004). Pengembangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *UU No. 33 Tahun 2004*. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Wijayanti, R. (2017). Pengaruh kompetensi sdm dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017*, 6, 18.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, 14(1), 56–64.
- Zulkarnain, & Ningrum, D. A. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197–211. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1161>